

## PERTEMUAN SBY DENGAN 7 JENDERAL PURNAWIRAWAN

Oleh: Muradi\*

Belum habis publik menerka-nerka agenda pertemuan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, yang merupakan purnawirawan jenderal bintang tiga, publik kembali dibuat penasaran dengan langkah SBY melakukan pertemuan dengan tujuh jenderal purnawirawan selang sehari dirinya bertemu dengan mantan Pangkostrad. Bisa jadi publik berusaha memahami pertemuan SBY dengan Prabowo adalah bagian dari agenda politik menjelang 2014, karena keduanya merupakan orang yang berpengaruh di Partai Demokrat dan Partai Gerindra. Namun pertemuan dengan tujuh jenderal purnawirawan tentu bukan sekedar silaturahmi yang tak direncanakan. Apalagi, tujuh jenderal purnawirawan tersebut tidak berusaha membawa label kepartaian sebagaimana Prabowo saat bertemu dengan SBY, karena dari tujuh purnawirawan jenderal tersebut, tidak semuanya berafiliasi dan menjadi pengurus partai politik. Dengan kata lain, pertemuan tersebut lebih mengedepankan esensi kemiliteran sebagai jenderal purnawirawan dari pada elit politik kepartaian.

Langkah Presiden SBY bertemu dengan sejumlah jenderal purnawirawan tersebut dipahami penulis menjadi lebih dari sekedar silaturahmi dan pembicaraan politik jelang 2014 nanti. Tapi juga mengundang tanya terkait dengan pemposisian TNI pada pergantian kepemimpinan tahun 2014 mendatang. Ada empat analisis terkait dengan pertemuan SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut, yakni: Pertama, Presiden SBY sadar benar bahwa soliditas TNI makin menguat, bukan hanya pada konteks profesionalitas kemiliteran, tapi juga agresifitas TNI yang mengarah ketidaksabaran atas proses demokrasi yang tengah berjalan saat ini. agresifitas dan ketidaksabaran TNI tersebut tercermin dari bagaimana TNI secara organisasi telah menata dan pada saat bersamaan berupaya memperkuat peran dan posisinya di luar domain pertahanan negara dalam berbagai penanganan gangguan keamanan, salah satunya penanganan konflik sosial yang telah diundangkan menjadi UU No. 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Agresifitas dan ketidaksabaran TNI tersebut dalam pandangan Morris Janowitz (1971) lebih didasarkan pada kekecewaan militer atas kelambanan sipil dalam mengelola pemerintahan, di tengah tekanan yang luar biasa pada militer untuk menjadi tentara profesional. Pada konteks ini agaknya Presiden SBY melihat sebagai bagian dari peluang untuk kembali merangkul TNI dengan dua harapan, mengamankan dirinya dan keluarga sebagai bagian

---

\* Penulis adalah Doktor (Ph.D) Ilmu Politik dari Flinders University, Australia, Dosen Ilmu Pemerintahan dan Program Pasca Sarjana Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, FISIP UNPAD, Bandung. Alamat: Kompleks Margahayu Raya, Jl. Saturnus Utara No. 47, Bandung. Phone/Faks: 022 7561828 Mobile: 081384330813. Email: [muradi\\_clark@unpad.ac.id](mailto:muradi_clark@unpad.ac.id), No. Acc BCA: 111-111-0781

dari keluar besar TNI, paska tidak menjabat sebagai presiden pada 2014 nanti dan memperkuat dominasi TNI pada perpolitikan nasional. Di mana ada harapan paska kepemimpinan SBY, ada kandidat berlatar belakang militer meneruskan kepemimpinannya. Dan hal tersebut secara eksplisit disampaikannya saat bertemu dengan Prabowo. Pertemuan tersebut dimaksudkan untuk meredam gerakan politik dari para jenderal purnawirawan yang berlawanan dengan esensi demokrasi yang tengah berjalan saat ini.

Kedua, pertemuan Presiden SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut adalah penegasan bahwa TNI adalah tentara yang tidak dapat lepas sepenuhnya dari dinamika politik. Karenanya Presiden SBY dirasakan perlu untuk bertemu dengan para jenderal purnawirawan sebagai bentuk pengakuan bahwa TNI harus dilibatkan dalam pembicaraan suksesi kepemimpinan nasional pada 2014 mendatang. Dalam konteks tersebut Ulf Sundhaussen (1982) menggarisbawahi bahwa keberadaan TNI dalam konteks politik Indonesia adalah sesuatu yang *given* dan melekat sifatnya. Sehingga langkah Presiden SBY mengundang para jenderal purnawirawan tersebut sebagai bentuk pengakuan atas eksistensi TNI. Selain itu, apa yang dilakukan oleh Presiden SBY adalah langkah mendahului agar agresifitas dan ketidaksabaran TNI atas penyelenggaraan negara yang tidak sesuai harapan dapat dikendalikan.

Ketiga, pertemuan Presiden SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut adalah refleksi dari konsolidasi sipil yang lemah dalam menyemai dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Energi dan pikiran Presiden SBY terkuras luar biasa untuk mengurus pertikaian dan konflik di Partai Demokrat. Pertemuan tersebut juga mensiratkan bahwa Presiden SBY secara personal melihat bahwa masa depan bangsa ini sulit terprediksi apabila dikelola oleh elit sipil yang gemar bertikai dan berkonflik. Bill Liddle (2008) menyangsikan elit sipil di Indonesia dapat lekas terkonsolidir bila melihat anatomi politik Indonesia paska Orde Baru yang cenderung berbasis pada oligarki dan patron-client.

Keempat, pertemuan Presiden SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut adalah implementasi gaya dan perilaku politik Presiden SBY yang penuh kehati-hatian dan cenderung mendalami suatu masalah berlarut-larut. Pertemuan tersebut juga harus dilihat sebagai bentuk pemetaan politik di TNI oleh Presiden SBY sebagai bekal suksesi kepemimpinan pada 2014 mendatang. Pertemuan dengan Prabowo dan kemudian dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut mengindikasikan bahwa Presiden SBY ingin mempertegas keyakinannya bahwa tidak ada lagi faksi-faksi yang membelah TNI sebagaimana yang terjadi hampir empat belas tahun lalu menjelang Rejim Orde Baru tumbang. Apabila TNI solid, maka hampir dipastikan bahwa Presiden SBY lebih nyaman mendorong figur-figur mantan tentara untuk menjadi penggantinya pada tahun 2014 mendatang.

Dari empat analisis pertemuan Presiden SBY dengan tujuh jenderal purnawirawan tersebut ada tiga benang merah yang mengindikasikan dan memperkuat bahwa pertemuan tersebut tidak sepenuhnya bebas dari

kepentingan kedua belah pihak. Ada upaya penjajakan dan membangun kepercayaan kembali antara TNI dengan Presiden SBY yang mana sepanjang periode kepemimpinan Presiden SBY, banyak kebijakan yang tidak berpihak dan menguntungkan TNI. Tiga benang merah tersebut yaitu: Pertama, menguatnya agresifitas dan ketidaksabaran TNI atas pengelolaan negara oleh elit politik sipil. Ketidaksabaran dan agresifitas tersebut tercermin dari bagaimana upaya TNI melalui sejumlah instrumen hukum agar dapat terlegitimasi dalam praktiknya, seperti pelibatan TNI dalam penanganan konflik sosial dan juga pro-kontra pembahasan RUU Keamanan Nasional (Kamnas).

Kedua, situasi kejiwaan dari TNI tersebut ditangkap oleh Presiden SBY sebagai peluang untuk dikelola bagi kepentingan dirinya dan keluarganya paska 2014 nanti. Sudah menjadi rahasia umum apabila praktik penyimpangan yang dilakukan di lingkaran terdekat Presiden SBY dan Partai Demokrat akan berimbas pula pada orang-orang terdekat dan keluarga dari Presiden SBY. Memosisikan TNI pada posisi terhormat akan memberikan harapan bagi Presiden SBY untuk berlindung dari segala kemungkinan yang akan menimpa diri dan keluarganya paska menyelesaikan periode keduanya.

Ketiga, pemberian posisi terhormat tersebut pada TNI setidaknya menegaskan bahwa konsolidasi sipil telah gagal menyiapkan kader-kader potensialnya guna membawa Indonesia menjadi lebih baik. pengalaman mengelola Partai Demokrat bagi Presiden SBY adalah sebuah bukti bahwa konsolidasi elit politik sipil telah gagal membawa Indonesia ke arah yang lebih baik. posisi terhormat tersebut dapat diartikan sebagai pengganti dirinya pada Pemilihan Presiden tahun 2014 mendatang.

Namun demikian, membaca setiap pertemuan di tahun politik ini tentu tidak bisa lepas dari mengemukanya berbagai kepentingan politik di dalamnya, apapun dapat terjadi dan direncanakan. Namun catatan penting yang harus digarisbawahi adalah bahwa proses pergantian kepemimpinan pada tahun 2014 mendatang harus sepenuhnya diserahkan pada kehendak rakyat dan bukan rekayasa. Apalagi menyodorkan figur-figur anti demokrasi yang hanya akan memudahkan esensi dari penguatan kesadaran politik rakyat itu sendiri